# BAB I

#  PENDAHULUAN

## **Latar Belakang Penelitian**

Hubungan internasional pada dasarnya mencakup seluruh aspek kehidupan sosial manusia yang bersifat internasional. Dalam memenuhi kebutuhan hidup negaranya, setiap negara didunia akan melakukan interaksi dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan nasionalnya. Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerjasama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas.

Kerjasama antar negara telah ada dari zaman dahulu kala, terlebih pada era globalisasi saat ini dimana interdepedensi atau ketergantungan antarnegara satu dengan negara yang lain sangat kuat sekali. Kerjasama antarnegara memiliki berbagai dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tertentu.[[1]](#footnote-2)

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam hubungan antar negara didunia internasional adalah faktor politik dan keamanan, oleh sebab itu ini merupakan penghambat kelancaran suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain. Namun, pada saat ini hubungan internasional suatu negara tidak lagi dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, melainkan pada faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antarbangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran – sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa.

Pada era modern, dikembangkan suatu kerjasama antar dua negara atau lebih atas nama kepentingan nasional masing – masing, yaitu apa yang disebut dengan kerjasama bilateral dan multilateral.

. Pada era globalisasi, era ketidakpastian dan tidak ada kutub kekuatan tertentu, terjadinya kekuatan tunggal dan asimetris, sangat menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan hubungan internasional antar komunitas pemerinntah negara didunia. Menguatnya ekonomi suatu negara, dipastikan negara itu akan menyeimbangkan dengan perkembangan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan kembali kekuatan angkatan bersenjatanya.

Faktor militer masih menduduki posisi penting dalam keamanan negara walaupun dalam lingkungan keamanan internasional ditekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan politik, ekonomi, dan diplomasi. Namun banyak negara yang menganggap cara militer merupakan usaha terpenting untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional.

Kerjasama bidang pertahanan antar negara, baik itu bilateral maupun multinasional selalu akan sangat sensitif, dan akan berdampak negatif dan positif bagi negara yang tergabung dalam kerja sama tersebut ataupun bagi negara – negara yang tidak tergabung dalam kerjasama pertahanan. Karena kerjasama pertahanan akan memperlihatkan ciri dan arah perjalanan dari suatu negara, serta kepentingan nasional apa yang diharapkan.[[2]](#footnote-3) Dilihat dari ikatnya, pada dasarnya merupakan kerjasama sukarela, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang terpaksa dilakukan karena berdasarkan kepentingan nasional dari masing - masing negara.

Indonesia tetap menganut prinsip menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerjasama pertahanan. Kepentingan Indonesia di bidang kerjasama pertahanan dengan negara lain semakin penting ditingkatkan, seiring dengan perkembangan isu – isu keamanan di lingkup regional dan global yang memerlukan penanganan bersama.

Sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Selatan terus mengalami perkembangan dan peningakatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hubungan yang erat ini terlihat pada peningkatan kerjasama dalam lima tahunn terakhir yang tercermin dari semakin bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua negara di berbagai bidang mencakup politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Korea Selatan sebagai salah satu mitra penting dikawasan Asia Pasifik selalu mendukung keutuhan NKRI. Di lain pihak, Indonesia senantiasa mendukung upaya denuklirisasi dan perdamaian di semenanjuk Korea.[[3]](#footnote-4)

Dalam perkembangannya, diplomasi kemudian menjadi hal yang wajar dilakukan oleh setiap negara – negara di dunia untuk mencapai *national interest* yang dimiliki suatu negara. Indonesia juga mengadopsi hal yang sama, seiring dengan perkembangan globalisasi, Indonesia melihat bahwa Korea Selatan merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk dapat bekerjasama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, karena ada hubungan interdepedensi yang terjadi antara Korea Selatan dan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi seta produk – produk teknologi dari Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Selatan membutuhkan sumber daya alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang begitu besar. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang *heavy industry,* dan telekomunikasi bagi Indonesia.

Dari sisi lingkaran konsentris Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Korea Selatan yang terletak di kawasan Asia Timur berada di lingkar kedua setelah ASEAN. Korea Selatan merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia.[[4]](#footnote-5) Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati sejumlah sektor kerjasama antara lain kerjasama pemberantasan korupsi, *counter – terorrism* dan penanggulangan kejahatan transnasional.

Disamping itu kedua negara juga menyepakati kerjasama antar parlemen serta kerjasama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran pejabat tinggi pertahanan dan militer kedua negara berlangsung cukup baik, ini mengindikasikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara semakin penting.

Hubungan militer antara Indonesia dengan Korea Selatan meningkat ketika tahun 1989 hingga 1997, Korea Selatan menunjuk pembantu atase militer untuk ditempatkan di KBRK di Jakarta. Selain itu, penempatan duta besar Indonesia di KBRI Seoul berasal dari latar belakang militer kedua negara, disamping kebijakan TNI untuk tetap bersikap pro terhadap Korea Selatan walaupun Indonesia memegang kebijakan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kedua korea (Korea Selatan dan Korea Utara). Berkembangnya hubungan kerjasama antara kedua pemerintah di bidang kemiliteran tersebut telah memberikan efek sinergis kepada sejumlah lapisan kenegaraan tidak hanya di bidang kerjasama perekonomian, tetapi juga di bidang – bidang kerjasama kemasyarakatan lainnya.[[5]](#footnote-6)

Pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye di sela – sela KTT ASEAN – Korea Selatan di Busan, Korea Selatan semakin memperkuat dan meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan yang selama ini terjalin dengan baik.[[6]](#footnote-7)

Reformasi besar – besaran dilakukan dengan mengembangkan senjata teknologi tinggi hampir dilakukan diseluruh dunia untuk beradaptasi dengan situasi baru ini dan menjaga kepentingan masing – masing, beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan milter, strategi militer, dan meningkatakan pertahanan dalam memperbaiki kualitas kekuatan militer. Untuk itu, pemerintah Indonesia menargetkan tercapainya kemandirian senjata untuk kebutuhan TNI, saat ini memprioritaskan pencarian alutista bergerak, seperti pesawat tempur dan tank, dan alutista tidak bergerak seperti radar. Untuk tercapainya kemandirian senjata, industri dalam negeri harus didukung penuh, untuk memproduksi senjata sendiri atau lewat kerjasama transfer teknologi pertahanan dengan negera – negera lain.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Indonesia (Kemhan RI) menandatangani perjanjian kerjasama pembuatan pesawat tempur dengan pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh *Defence Aqcuisition Program Administration* (DAPA). Mengingat nota keinginan bersama tentang proyek pembangunan bersama pesawat jet tempur antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan *Defence Aqcuisition Program Administration* Republik Korea yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2009. Berkeinginan meningkatkan pengembangan pertahanan yang saling menguntungkan guna kepentingan bersama. Memahami bahwa kegiatan kerjasama seperti tersebut dalam Memorandum Saling Pengertian (MOU) ini akan konsisten dengan komitmen-komitmen kedua negara di lingkungan internasional dan mengacu pada ketersediaan dana dan personel yang memadai para pihak.

Melalui Kementerian Pertahanan, Indonesia bersepakat melanjutkan program pembangungan bersama proyek pesawat tempur modern KFX/IFX dalam *Defence Acquisition Program Adminnistration* (DAPA). Kemampuan pesawat tempur teknologi generasi 4,5 ini diklaim lebih baik dibanding F-16 dan Sukhoi yang sudah dimiliki Indonesia.[[7]](#footnote-8)

Program kerjasama pembangunan pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan simbol hubungan baik antara kedua negara. Namun sempat terjadi penundaan dalam pelaksanaan pengembangan pesawat tempur yang akan memasuki fase *Enginering Manufacturing Design* (EMD) sekitar pada tahun 2013 yang lalu dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan mempunyai komitmen yang kuat dan sejauh ini mengenai kerjasama program tersebut tidak berubah serta akan terus dilanjutkan.[[8]](#footnote-9)

Pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan ini bisa disebut adalah kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan yang paling besar. Hal ini karena nilai kerjasama militer ini sangat besar mencapai puluhan juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki kerjasama militer yang sangat erat sekali.[[9]](#footnote-10)

Proyek ini juga telah mencapai tahap penentuan kontraktor utama yang akan menjalankan projek pengembangan pesawat tempur canggih ini. Penentuan terhadap tender ini akan diumumkan pada pertengahan tahun ini sekitar bulan Juni 2015 nanti. Sehingga pada pertengahan tahun 2015 ini projek KFX/IFX sudah akan memasuki tahap *full scale development* yang sepertinya akan dimulai tahap *Enginering Manufacturing Design* (EMD) dan tahap produksi prototype serta testing. Ini akan dilakukan dalam rentang tahun 2015 sampai tahun 2025 mendatang.[[10]](#footnote-11)

Tim KFX/IFX akan membekalinya dengan perangkat elekrtonik yang bisa menuntun pesawat mengelak dari radar. Sayap vertikalnya juga di buat miring *(canted vertical tail)* untuk gelombang radar tidak mampu menjejak bagian yang paling rawan ini.

Dengan demikian seiring dengan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul :

**“KERJASAMA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DI BIDANG PERTAHANAN DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KFX/IFX (Studi Kasus Kerjasama Kementerian Pertahanan Indonesia dan Defence Acquisition Program Administration)”**

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur?
2. Bagaimana kebijakan pertahanan Indonesia serta peranannya terhadap pengembangan pesawat tempur KFX/IFX?
3. Bagaimana kondisi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX saat ini?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang diuraikan diatas tidak menyebar kemana-mana maka penulis berusaha mengerucutkan masalah dengan jalan membatasi masalah tersebut. Maka penulis mencoba untuk membatasi penelitiannya pada: kondisi kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan, serta kondisi pembangunan pesawat tempur KFX/IFX pada tahun 2015 - 2020.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk research problem, yaitu :

**“Bagaimana kondisi kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, dan pengaruhnya dalam pengembangan pesawat KFX/IFX?”.**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui alasan Indonesia memilih Korea Selatan sebagai mitra kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pertahanan Indonesia bagi pengembangan pesawat tempur KFX/IFX
5. Untuk mengetahui perkembangan atau kondisi proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX saat ini.
6. **Kegunaan Penelitian:**
7. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah Internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalitis suatu permasalahan khususnya dibidang kerjasama pertahanan terutama dalam konteks pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.
8. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian sehubungan dengan kerjasama di bidang pertahanan terutama dalam konteks pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.
9. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata – 1 (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
11. **Kerangka Teoritis**

Hubungan antar bangsa sudah menjadi suatu hubungan yang berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut masyarakat antar bangsa. Hubungan tersebut terjadi karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang merupakan bagian dari wilayah politik.

Suatu hubungan yang dilakukan atas dasar batas wilayah atau regionalnya disebut hubungan internasional. Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian di bidang Hubungan Internasional. Hubungan internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif muda, dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sesungguhnya ilmu ini pada pelaksanaanya telah terjadi semenjak ribuan tahun lalu, hubungan antar bangsa bahkan terhadap suku primitif yang merupakan nenek moyang kita telah melakukannya terlebih dahulu.

Hubungan internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh duniua dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya. Definisi hubungan internasional sendiri menurut **Mochtar Mas’oed** dalam bukunya Disiplin dan Metodologi yang dikutip oleh DR. Anak Agung Banyu Perwita, sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisispasi dalam politik internasional, yang meliputi negara – negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu”.[[11]](#footnote-12)**

Dalam hubungan internasional suatu negara tidak terlepas dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi penting untuk diperhatikan karena tidak dapat dilepaskan dari prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik. Smith mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah:

**“Kepentingan nasional sebagai upaya mengejar keuntungan materi sendiri adalah kondisi normal manusia. Ini adalah akumulasi dari kepentingan diri masing – masing individu. Sebuah keadaan alami yang diproduksi tanpa pikiran sadar atau perencanaan”.[[12]](#footnote-13)**

Kepentingan nasional Indonesia yang paling utama adalah kepentingan yang terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Lingkungan strategis Indonesia adalah regional dan global dengan segala dinamikanya. Indonesia juga tidak terlepas dari limpahan sejumlah konflik didunia.[[13]](#footnote-14)

Politik internasional biasanya berintegrasi dari aktor – aktor politik yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri merupakan pencerminan dari karakteristik suatu negara dalam upaya berperan dalam urusan – urusan internasional, yang secara langsung menunjukkan arah tindakan atau sikap suatu negara sebagai instrumen yang diperlukan setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dengan aktor – aktor hubungan lainnya. Selanjutnya, pengertian politik internasional menurut **R. Sumpena Prawirasaputra** diartikan sebagai berikut:

**“Kumpulan kebijakan suatu Negara untuk mengatur hubungan luar negerinya, ia (politik luar negeri) merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata – mata dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan yang telah ditetapkan khususnya untuk menghadapi kurun waktu yang sedang dihadapinya dan lazim disebut kepentingan nasional. Selanjutnya merupakan pola sikap ataupun respon terhadap lingkungan ekologinya, respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi pengalaman dan kekayaan alam serta kebudayaan yang dimanifestasikan sebagai falsafah dan diakomodasikan dalam konstitusi”.**

Dalam konsep kedaulatan negara dikatakan bahwa negara adalah berdaulat, sehingga suatu negara memiliki kedaulatan untuk menentukan sendiri bagaimana negara tersebut membuat kebijakan baik dalam internal negara tersebut maupun kebijakan eksternal dalam berhubungan dengan negara lain tanpa adanya campur tangan dari pihak negara lain untuk menentukan arah kebijakannya, maka dalam hubungan antara negara berdasarkan piagam PBB tentang persamaan kedaulatan semua negara, dan juga tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Maka dengan itu menurut **C.C Rodee** (dkk) akan menjelaskan konsep politik luar negeri sebagai berikut:

“**Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan dengan negara-negara lain”.[[14]](#footnote-15)**

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Menurut Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kebijakan Pertahanan merupakan pertimbangan untuk melakukan atau tidak persetujuan dengan suatu negara harus mempertimbangkan kebijakan pertahanan yang menjadi *guide* dalam manajemen pertahanan selanjutnya termasuk dalam menentukan strategi pertahanan dan militer.

Berbicara mengenai pertahanan negara tentu saja semua orang paham apa yang dimaksud dengan pertahanan, maka menurut **Andi Widjajanto et. al** menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara. Sedangkan sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan semua warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.

Pertahanan negara didefinisikan dalam UU 34/2004, Pasal 1 ayat 5, sebagai berikut:

**“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan kesatuan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”.**

Pertahanan merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dari dimensi – dimensi lainnya. Karena apabila melihat konsep keamanan nasional dari perspektif *domain,* yaitu melihat cakupan keamanan nasonal terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan, internal, kertertiban publik, dan manajemen bencana[[15]](#footnote-16) .Keamanan nasional tidak hanya menjadi keamanan terhadap negara saja, yaitu adanya ancaman militer terhadap suatu negara seperti pemahaman sebelum berkembangnya ilmi hubungan internasional namun lebih dari itu keamanan nasional secara kotemporer mempunyai pengertian yang lebih luas tidak melulu hanya adanya ancaman militer saja, tetapi juga ancaman – ancaman yang bersifat non-militer. .Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing – masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut **Barry Buzan** :

**“Keamanan berkaitan dengan kelangsungan hidup (survival). Isu – isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip – prinsip yang dimiliki oleh unit – unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana – sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut”.[[16]](#footnote-17)**

Tingkat ancaman militer terhadap suatu negara bervariasi, tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Mulai dari pelanggaran batas teritorial, hukuman, batas teritorial negara dan invasi. Tujuannya beragam, mulai dari persoalan minor seperti pelanggaran batas laut teritorial, sampai perbedaan paham yang dianut negara lain. Sedangkan konsep ancaman terhadap keamanan sendiri didefinisikan **Ullman** sebagai berikut:

***“An action or sequence of events that (1) threatens drasstically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for inhabitants of a state or (2) significantly to narrow the range of policy choices available to goverment of a state, to private, nongovermental entities (persons, group, corporations) within the state”.****[[17]](#footnote-18)*

Keamanan nasional sangat tergantung pada berbagai faktor. Faktor – faktor penting tersebut antara lain : moral prajurit atau warga negara, jumlah cerdik pandai dari ilmuan, karakter dan keterampilan dari politisi dan para pemimpin militer, posisi geografi suatu negara tergadap negara lainnya, kekuatan angin yang bertiup melintasi suatu ruang tertentu terutama dalam penggunaan senjata nuklir-biologi-kimia, serta faktor politik internasional. Tetapi “pertahanan” juga sangat tergantung pada faktor ekonomi, sangat bervariasi interpretasi dan definisinya. Beberapa ahli menekankan pentingnya faktor ekonomi berkaitan dengan kekuatan ekonomi nasional yang berkaitan dengan kekuatan militer. Ekonomi pertahanan menurut **Todd Sandler** yaitu:

“**Ekonomi pertahanan merupakan studi tentang biaya – biaya pertahanan yang mengkaji masalah pertahanan dan perdamaian dengan menggunakan analisis dan metode ekonomi yang meliputi kajian mikroekonomi seperti optimiasi statis dan dinamis, teori – teori pertumbuhan, distribusi, perbandingan data, statistik dan ekonometrik (penggunaan statistika model ekonomi).**”[[18]](#footnote-19)

Namun, ekonomi pertahanan ternyata untuk beberapa pihak menguntungkan, seperti penjelasan Sapolsky dalam bukunya, sebagai berikut

“***It is immposible to understand the politics of defense without understanding the political economy of defense. Defense policy defends on the resources allocated to defense budget, and various catagories of defense spending give life (and profits) to a set interests, notably including industry***”.[[19]](#footnote-20)

Dalam politik internasional, suatu negara pasti melakukan interaksi dimana kondisi itu akan meningkat menjadi kerjasama untuk mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan tindakan – tindakan individual oleh negara yang memberi dampak kepada negara yang lainnya, adapun definisi tentang kerjasama internasional menurut **K.J. Holsti** yaitu :

“**Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan menghasilkan sesuatu dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnnya akan membantu mencapai kepentingan dan nilai – nilainya, persetujuan atau masalah – masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka**.”[[20]](#footnote-21)

Sebenarnya atau seharusnya, faktor ekonomi jangan dijadikan bahan pertimbahan yang eksklusif, seperti diinterpretasikan secara tidak langsung, misalnya membandingkan kegiatan militer dengan industri atau perdagangan. Permasalahan ekonomi dalam bidang pertahanan sebaiknya jangan terlalu dikaitkan dengan “penghematan”-mengurangi pembelanjaan walaupun sebenarnya barang itu sangat penting untuk dibeli. Juga bukan karena penerapan suatu doktrin yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya pemilihan doktrin dan tehnik untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia.[[21]](#footnote-22)

“**Teori ekonomi Indonesia adalah adanya kesempatan yang harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil dari adanya kerjasama ekonomi di bidang perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan proses kenaikan tingkat perkembangan dari pendapatan kapita Indonesia yang mana peningkatan ini terjadi disebabkan oleh pertumbuhan disemua sektor pembangunan, yang salah satunya dari hasil kerjasama ekonomi internasional**”.[[22]](#footnote-23)

Dalam kerjasama dengan negara-negara didunia tidak terlepas dari mencari keuntungan bagi negara-negara yang melakukan kerjasama itu sendiri. Tentunya negara-negara itu memiliki strategi untuk bagaimana mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Menurut Walter Lippman pengertian strategi *a nation is secure to the extent to wich is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, of challenged, to maintain them by victory in such a war.[[23]](#footnote-24)*

Kebijakan nasional pada hakikatnya merupakan alat atau media unutk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, baik domestik maupun internasional. Antara lain untuk masyarakat domestik, yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam kerangka hubungan internasional, kebijakan nasional, terutama kebijakan pertahanan merupakan media untuk membangun rasa saling percaya dengan negara – negara lain, baik dalam konteks regional maupun global.[[24]](#footnote-25)

Kebijakan pertahanan diartikan oleh **William Dunn** sebagai berikut:

**“Kebijakan pertahanan merupakan salah satu kebijakan publik, yaitu kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.”[[25]](#footnote-26)**

Kerjasama pertahanan tetntunya melibatkan industri pertahanan setiap negara, karena industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi atau logistik ataupun jasa – jasa kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Industri pertahanan menjadi sangat penting untuk berjalannya sebuah kerjasama pertahanan, kesanggupan industri pertahanan untuk mengembangkan produk persenjataan menciptakan sebuah perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 1 dijelaskan tentang industri pertahanan, yang artinya sebagai berikut:

**“Industri pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik swasta baik secara mandiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”[[26]](#footnote-27)**

Kerjasama di bidang pertahanan dengan Korea Selatan telah menjadi salah satu dalam pembangungan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Kerjasama ini menyepakati kerjasama di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerjasama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan juga telah lama mengembangkan kerjasama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Pertahanan negara bukanlah hal yang eksklusif. Meskipun Indonesia mengembangkan pertahanan yang mandiri dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain, Indonesia tetap menganut prinsip menjalin hubungan dengan negara lain melalui kerjasama pertahanan. Kepentingan Indonesia di bidang kerjasama pertahanan dengan negara lain di waktu – waktu akan datang semakin penting ditingkatkan, seiring dengan perkembangan isu – isu keamanan di lingkup regional dan global yang memerlukan penanganan bersama.[[27]](#footnote-28) Sementara itu, *Minister of Defence Acquisition Program Administration* (DAPA) Republik Korea Selatan Chang Myoungjin menilai, penandatanganan ini merupakan tonggak dimulainya kerjasama antara ilmuan Indonesia dan Korea Selatan.

Membahas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan, **Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno** dalam bukunya yang berjudul Tentang Ilmu Pertahanan mendefinisikan kerjasama pertahanan sebagai berikut:

 **“Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara, kareana kerjasama ini sangat sensitif dan akan menyangkut kedaulatan negara, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan rakyat”[[28]](#footnote-29)**

Indonesia dan Korea Selatan telah menjadi mitra strategis sejak tahun 2006, salah satu simbol hubungan baik antara Indonesia dan Korea Selatan adalah pengembangan pesawat jet tempur *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment* (KFX/IFX). Program tersebut sejalan dengan niat Indonesia untuk mandiri dalam hal alat utama sistem persenjataan (alutista).[[29]](#footnote-30) Pengembangan pesawat ini diharapkan menjadi sebuah pengalaman yang baik untuk Indonesia yang diharapkan dapat membuat pesawat tempur sendiri tanpa bergantung dengan pembelian pesawat tempur terhadap negara – negara barat yang mudah sekali akan embargo.

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

Sementara pengembangan diartikan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

**“Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi yang baru.”[[30]](#footnote-31)**

Pesawat tempur sangat dibutuhkan oleh setiap negara, terutama oleh negara yang memiliki wilaya daratan dan lautan yang sangat luas seperti Indonesia. Dengan wilayah yang luas tentu saja Indonesia membutuhkan peralatan (alutista) yang canggih untuk menjaga pertahanan negara. Dan pesawat tempur adalah pesawat militer yang dirancang untuk menyerang pesawat lain di udara yang berbentuk relatif lebih kecil, cepat, dan lincah serta membawa perlengkapan senjata dan memiliki teknologi yang canggih seperti radar.

Dalam rangka untuk membangun kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, diperlukan penigkatan kemampuan industri pertahanan. Pengembangan pesawat tempur yang dilakukan Indonesia untuk membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan. Akhirnya Indonesia melakukan kerjasama pengembangan pesawat tempur dengan Korea Selatan dengan program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Yang dimaksud dengan program pengembangan pesawat tempur IFX adalah Program nasional yang dilaksanan untuk mewujudkan kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan pesawat tempur.[[31]](#footnote-32)

Dalam proses pengembangan pesawa tempur KFX/IFX terdapat beberapa tahap seperti, tahap pengembangan teknologi, tahap pengembangan rekayasa dan manufaktur, dan tahap produksi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2014 yang dimaksud dengan tahap – tahap dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX adalah:

1. **“Tahap pembangunan teknologi adalah untuk membangun persyaratan operasional, identitas teknologi, dan desain konfigurasi pesawat tempur IFX.**
2. **Tahap pengemban rekayasa dan manufaktur adalah tahapan dalam pembuatan desain awal, desain detail sampai prototipe, pengujian, dan sertifikasi.**
3. **Tahap produksi adalah tahap pembuatan pesawat tempur.”[[32]](#footnote-33)**

Kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini dilakukan Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2011, dimana Indonesia menanggung 20 % biaya pengembangan dan sisanya 80 % akan ditanggung pemerintah Korea Selatan. Pesawat tempur ini akan lebih canggih dari pesawat tempur F – 16 *Fighting Falcon* namun tidak lebih canggih dari pesawat tempur F – 32 *Lighting* II. Peswat tempur ini diharapkan akan menjadi modal awal bagi bangsa Indonesia untuk membuat pesawat tempur yang lebih canggih di masa depan.

Pesawat tempur KFX/IFX sendiri diartikan oleh pakar kedirgantaraan **Mulyo Widodo**, yaitu:

**“Pesawat ini berteknologi jet tempur generasi 4,5 atau 5 yang merupakan elektronik dan material penyerap gelombang radar. Elektronik dalam arti avionik untuk mengendalikan penerbangan dan misi serangan. Sementara material penyerap gelombang radar bisa digambarkan sebagai “kulit pesawat” yang bisa menyerap gelombang elektromagnet radar penjejak pesawat.”[[33]](#footnote-34)**

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik asumsi yang berdasarkan kerangka teoritis diatas, sebagai berikut:

1. Pengembangan pesawat tempur ini dapat di jadikan sebagai acuan untuk meningkatkan industri pertahanan Indonesia.
2. Kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam kerjasamanya dengan Indonesia ditandai dengan diberikannya keringanan dalam biaya pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.
3. Pertahanan dan keamanan sebuah negara adalah faktor terpenting untuk menentukan sebuah kebijakan politik luar negeri negara semata – mata untuk melindungi negara dan kawasan negara kedaulatannya.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahn di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan sesuai dengan perjanjian untuk saling konsisten dalam pengembangan bersama pesawat tempur, maka pengembangan pesawat tempur KFX/IFX akan meningkat.”**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel****(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| *Variabel bebas :**Jika* kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KFX/IFX berjalan sesuai dengan perjanjian. | 1. 1. Terjadinya kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.
 | 1. Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakatai nota kesepahaman dan perjanjian logistik, kerjasama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Yang mengindikasikan bahwa hubungan kedua negara semakin penting (data dari Buku Putih Pertahanan tahun 2008). |
| *Variabel Terikat :**Maka* pengembangan pesawat jet tempur KFX/IFX akan meningkat. | 1. Meningkatkan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX.2. Perkembangan pesawat tempur KFX/IFX. | 1. Berkeinginan meningkatkan pengembangan pertahanan yang saling menguntungkan guna kepentingan bersama. Mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan bersama pesawat tempur Korea, KFX. (data dari http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index).2. Proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX sempat ditunda, namun saat proyek ini kembali berlanjut. Ditandai dengan penandatanganan kontrak *Cost Share Agreement* (CSA). Ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan tahap kedua atau EMD *(Engineering and Manufacturing Development).* (data dari berita detiknews.com). |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Korea Selatan

Kerjasama Pertahanan

Indonesia

1. Menjalin hubungan bilateral.
2. Mengganti pesawat tempur buatan Korea Selatan yang telah usang.
3. Menjaga hubungan baik dengan Korea Selatan.
4. Menambah kekuatan militer di Indonesia.
5. Meningkatkan sektor industri pertahanan di Indonesia.

Kerjasama Pengembangan pesawat tempur KFX/IFX

Membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur.

Mengurangi ketergantungan pembelian pesawat tempur Indonesia terhadap negara – negara barat, meningkatkan industri pertahanan Indonesia dan mengembangkan pertahanan yang mandiri dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain.

Tercapainya kekuatan alutsista atau kendaraan militer Indonesia sehingga membuat semakin kuat dalam menjaga wilayah udara Indonesia.

## **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

1. **Tingkat Analisis**

Terdapat tiga analisis hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasionis, model induksionis, dan model induksionis. Berdasarkan judul yang telah ditetapkan maka hasil penulisan ini termasuk dalam tingkat analisis korelasionis, karena analisa berada pada tingkat yang sejajar.

1. **Metode Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah (skripsi) terdapat metode yang harus digunakan sesuai dengan standar penulisan skripsi yang ada. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Historis Analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa, mengumpulkan data, dan fakta – fakta tentang kejadia di masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini. Menganalisa secara generalisasi situasi sekarang dan kemungkinan perkembangannya di masa yang akan datang.
2. Metode Deskriptif Analisis. Maksud dari metode ini yaitu metode penelitian yang menggambarkan, mengklarifikasi serta menganalisis gejala atau fenomena, yang sesuai dengan permasalahan dan ditunjang oleh beberapa pendekatan dengan maksud untuk mempermudah cara memandang, alat analisis tentang suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui literatur atau yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu usaha untuk mencari data dan mengumpulkan data serta informasi tersebut berdasarkan penelaahan literatur atau referensi, baik itu bersumber dari buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, laporan lembaga pemerintah maupon non pemerintah, situs – situs atau website internet, dan catatan penting lainnya mengenai hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung

Jalan. Lengkong Besar No.68 Bandung.

1. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung

Jatinangor, Bandung.

1. **Lamanya Penelitian**

Adapun lamanya penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak bulan Ferbruari 2015 sampai dengan April 2015.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dibuat secara jelas, ringkas dan padat, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dari suatu laporan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II: MEMBAHAS TENTANG GAMBARAN UMUM KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN**

Pada bab ini membahas secara umum kondisi kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan serta membahas secara spesifik mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan terutama dalam bidang pertahanan.

**BAB III: MEMBAHAS TINJAUAN UMUM KONDISI KENDARAAN MILITER UDARA INDONESIA**

Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi umum alutsista atau kendaraan militer Indonesia khususnya pada kendaraan militer udara Indonesia.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

1. Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmi Pertahanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014, hal.136. [↑](#footnote-ref-2)
2. Makmur Supriyatno, *Ibid.*hlm136. [↑](#footnote-ref-3)
3. http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id. Diakses 16 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor. [↑](#footnote-ref-5)
5. Yang Seung-yoon, *Hubungan Bilateral Korea – Indonesia Pada Era Asia Timur: Sebuah Pembahasan Dalam Perspektif Globalisasi* (FISIP UI Press:2004). [↑](#footnote-ref-6)
6. http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/18/333781/indonesia-dan-korsel-tingkatkan-kerja-sama-pertahanan [↑](#footnote-ref-7)
7. http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/06/078612295/indonesia-korsel-teken-proyek-pembuatan-50-pesawat-tempur [↑](#footnote-ref-8)
8. http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=1732 [↑](#footnote-ref-9)
9. http://militerindonesia.net/read/44/4\_Kerjasama\_Militer\_Indonesia\_dengan\_Korea\_Selatan\_2 [↑](#footnote-ref-10)
10. http://pesawattempur.com/read/18/Project\_Pesawat\_Tempur\_KFXIFX\_Korea\_dan\_Indonesia [↑](#footnote-ref-11)
11. Mochtar Ma’oed, Ilmu Hubungan Internasional; *Disiplin dan Metodologi,* LP3ES*,* Bandung, 2005, hal.28. [↑](#footnote-ref-12)
12. Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Hubungan Internasional* (Jakarta: Jayabaya University Press, 1999), hal 107. [↑](#footnote-ref-13)
13. https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf [↑](#footnote-ref-14)
14. Iin Nurdin. *Analisis Politik Luar Negeri* (Jakarta,2010) hal.35. [↑](#footnote-ref-15)
15. Makmur Supriyatno, *Tentan Ilmu Pertahanan,* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2014 [↑](#footnote-ref-16)
16. Buzan, Barry. 1991. People, state, and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Hempstead: Harverster Wheatsheaf, halaman 2-3. [↑](#footnote-ref-17)
17. [http://ayuningtyasalfatih.blogspot.com/2009/06/konsep-keamanan-dalam-konteks-hubungan.html,diakses](http://ayuningtyasalfatih.blogspot.com/2009/06/konsep-keamanan-dalam-konteks-hubungan.html%2Cdiakses) pada tanggal 9 Januari 2015. Pada pukul 11:41 [↑](#footnote-ref-18)
18. Sandler, 2000: 208 [↑](#footnote-ref-19)
19. Harvey M.Sapolsky, Eugee Gholz dan Caitlin, *US Defense Politics: The Origins of Security Policy,* Routledge, New York, 2009, hal 61. [↑](#footnote-ref-20)
20. K.J. Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II,* (Terjemahan M. Tahrir Azhari). (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 652-653 [↑](#footnote-ref-21)
21. Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan,* Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal 228. [↑](#footnote-ref-22)
22. Soemitro Djojohadilusumo, *Ekonomi Makro Indonesia,* Jakarta, Gramedia, 1994, hal.7. [↑](#footnote-ref-23)
23. Walter Lippman, US Foreign Policy:Shield Of the Republic (Little Brown,Boston,1943), hal.51. [↑](#footnote-ref-24)
24. *OpCit.,* Makmur Supriyatno, hal 115 [↑](#footnote-ref-25)
25. William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Yogyakarta:Gajah Mada University Perss, 1998, hal.24. [↑](#footnote-ref-26)
26. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\_perundangan&id=3768&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2012. [↑](#footnote-ref-27)
27. https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf [↑](#footnote-ref-28)
28. *Op.Cit.,* Makmur Supriyatno, hal 140 [↑](#footnote-ref-29)
29. http://news.liputan6.com/read/2377013/dubes-cho-kfxifx-buatan-ri-korsel-jet-tempur-masa-depan [↑](#footnote-ref-30)
30. http://eprints.uny.ac.id/9378/3/BAB%202%20-%2007601241082.pdf [↑](#footnote-ref-31)
31. file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Perpres\_136\_2014.pdf [↑](#footnote-ref-32)
32. http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/01/23/p/e/perpres\_no.136-2014.pdf [↑](#footnote-ref-33)
33. http://www.harnas.co/2016/01/08/pesawat-tempur-kfxifx-masuki-tahap-dua [↑](#footnote-ref-34)